

MEMORANDUM AKHIR MASA JABATAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1984 - 1989

Anton M. Moeliono

**MEMORANDUM AKHIR MASA JABATAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1984 – 1989**

Anton M. Moeliono

Handwritten text, possibly a signature or title, centered on the page.

Small handwritten text or mark located in the lower right quadrant of the page.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	2
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	2
2.2 Susunan Organisasi	2
3. Ruang Lingkup	3
 BAB II KEADAAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA PADA TAHUN 1984 (Awal Masa Tugas)	 4
1. Keadaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	4
2. Masalah yang Dihadapi	5
 BAB III DASAR KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA	 7
1. Dasar Kebijakan	7

	2. Pelaksanaan Tugas	8
	3. Beberapa Hasil yang Dicapai Berdasarkan Program yang Diprioritaskan	9
BAB IV	RENCANA DAN PROGRAM KERJA TAHUN 1989/ 1990	15
BAB V	PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan

Memorandum ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selama masa bakti yang dimulai pada bulan Oktober 1984 hingga bulan Maret 1989, yakni sejak saya dilantik sampai dengan akhir masa jabatan saya. Selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, saya ditugasi untuk lebih meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa. Selama kurun waktu 1984 — 1989 itu, saya telah berusaha melaksanakan berbagai upaya yang berkenaan dengan rangkaian pembinaan dan pengembangan bahasa melalui serangkaian kegiatan kebahasaan dan kesusastraan, mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri, meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kebahasaan dan kesusastraan, khususnya dalam rangka pembinaan pegawai di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan meningkatkan pengadaan pemanfaatan berbagai sarana penunjang.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak jarang pula dihadapi berbagai hambatan. Secara umum hambatan itu dapat diatasi sesuai dengan batas kemampuan yang ada kecuali permasalahan yang penyelesaiannya berkaitan dengan lintas sektoral dan lintas departemental.

Memorandum ini dimaksudkan untuk memberikan seperangkat informasi mengenai berbagai hal yang telah dan belum dapat dilaksanakan serta berbagai masalah dan upaya penanggulangannya sebagai bahan rujukan bagi pimpinan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang baru dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa. Selain itu, memorandum ini juga

dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi para pejabat dan pelaksana di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam upaya peningkatan tugas dan fungsinya.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Organisasi

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0222g/0/1080 tanggal 11 September 1980, kedudukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dirumuskan sebagai pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipimpin langsung oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibina dan dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.

Tugas pokok Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kebijakan teknis di bidang penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan bahasa serta membina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah; dan
- c. melaksanakan urusan tata usaha Pusat.

2.2 Susunan Organisasi

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terdiri atas unit kerja yang berikut:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah;
- c. Bidang Sastra Indonesia dan Daerah;
- d. Bidang Perkamusan dan Peristilahan;
- e. Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis di tiga propinsi, yaitu Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujungpandang.

3. Ruang Lingkup

Memorandum ini akan memuat seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, baik program rutin maupun pembangunan, mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa selama kurun waktu kira-kira empat setengah tahun (Oktober 1984 — Maret 1989) dengan sistematika penulisannya sebagai berikut: (1) Pendahuluan; (2) Keadaan dan Permasalahan yang Dihadapi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1984; (3) Dasar Kebijakan dan Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (4) Rencana dan Program Kerja Tahun 1989/1990; dan (5) Penutup.

BAB II

KEADAAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA PADA TAHUN 1984

1. Keadaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, salah satu lembaga di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana di bidang penelitian, pembinaan dan pengembangan bahasa dan susastra berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas itu, keadaan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 079/0/1975, tanggal 25 April 1975, dan yang disempurnakan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 0222g/0/1980, terdiri atas:

- 1) Bagian Tata Usaha dengan (1) Subbagian Kepegawaian; (2) Subbagian Keuangan; dan (3) Subbagian Urusan Dalam;
- 2) Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah;
- 3) Bidang Sastra Indonesia dan Daerah;
- 4) Bidang Perkamusan dan Peristilahan; dan
- 5) Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Di samping itu, terdapat tiga unit pelaksana teknis di tiga propinsi, yaitu (1) Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta; (2) Balai Penelitian Bahasa di Denpasar; dan (3) Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang. Balai Bahasa di Denpasar, hingga tahun 1987 berlokasi di Singaraja. Dalam upaya mempermudah komunikasi antar-instansi dalam lingkungan pemerintah daerah tingkat I, serta meningkatkan peran Balai Bahasa dalam pembinaan dan pe-

ngembangan bahasa karena beban tugas yang menjadi tanggung jawab Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa makin lama makin luas lingkupnya.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah penyempurnaan struktur organisasi dan peningkatan peran serta fungsi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selain itu, perlu segera diwujudkan penambahan balai bahasa di daerah sehingga jumlah yang semula hanya tiga buah secara berangsur pada akhir Repelita V sudah bertambah menjadi delapan buah: Padang, Bandung, Yogya, Denpasar, Banjarmasin, Ujungpandang, Kupang, dan Jayapura.

Tenaga teknis empat tahun lalu belum memadai, baik dalam jumlah maupun mutunya. Hal itu terlihat pada perbedaan yang mencolok karena jumlah tenaga administrasi jauh lebih banyak daripada tenaga teknis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditunjang oleh dua sumber dana, yaitu :

- a. Dana Rutin (Pembinaan Bahasa Nasional) dan
- b. Dana Pembangunan:
 - 1) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - 2) Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Sarana penunjang lain, seperti gedung kantor, peralatan, serta perabot kantor yang tersedia, perlu diperbarui dan dilengkapi demi kelancaran tugas.

2. Masalah yang Dihadapi

Masalah kebahasaan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Bahasa Indonesia dalam berbagai fungsinya : sebagai bahasa negara, sarana komunikasi ilmu dan teknologi, sarana pendidikan, dan sarana pengembangan kebudayaan, wajib ditingkatkan pengembangan dan pembinaannya secara terpadu dan terencana. Dengan demikian, masyarakat bahasa Indonesia akan memiliki alat komunikasi yang canggih, yang mempunyai bentuk estetik, luwes, dan beragam, sesuai dengan keperluan pemakaiannya. Langkah yang perlu dilanjutkan ialah pemantapan ejaan yang sudah dibakukan, pemasyarakatan tata bahasa yang baku, pengembangan kamus dan berbagai laras bahasa Indonesia, berdasarkan perencanaan bahasa yang cermat dan teliti.

- b. Kemampuan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam situasi yang memerlukan serta jumlah pemakaiannya masih perlu ditingkatkan agar tercapai keterampilan berbahasa yang tinggi dan sikap positif yang mengandung unsur kebanggaan bahasa, kesetiaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Sasaran itu harus diusahakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
- c. Bahasa daerah Nusantara yang dipelihara masyarakatnya perlu tetap dibina karena bahasa itu juga berperan sebagai wadah kebudayaan daerah sebagai unsur budaya nasional. Untuk maksud itu penelitian bahasa daerah perlu digalakkan dengan sasaran penyusunan gramatikal deskriptif bahasa daerah yang penting dan kamus dwibahasa bahasa daerah.
- d. Susastra Indonesia dan susastra daerah sebagai hasil reka cipta dunia seni Indonesia perlu dibina dan dikembangkan agar dapat diminati dan dinikmati oleh kalangan masyarakat Indonesia yang lebih luas.
- e. Jumlah dan mutu profesional tenaga kebahasaan dan kesusastraan perlu ditingkatkan jika dikaitkan dengan peluasan tugas pembinaan dan pengembangan bahasa.

BAB III

DASAR KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

1. Dasar Kebijakan

Dasar yang dipakai sebagai landasan kerja dalam pembinaan dan pengembangan bahasa adalah yang berikut.

1.1 Peraturan Perundang-undangan

- a. Pancasila,
- b. Undang-Undang Dasar 1945 (Bab XV, Pasal 36),
- c. GBHN 1983 dan 1988,
- d. Repelita IV dan V, dan
- e. Keputusan dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan dan kesusastraan.

1.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang ditetapkan dalam GBHN tahun 1983 dan 1988, serta Repelita IV dan V, khususnya dalam bidang kebahasaan dan kesusastraan, kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. usaha melanjutkan pembakuan bahasa melalui pelengkapan ejaan, tata bahasa, dan kamus bahasa Indonesia; penyusunan tata bahasa daerah dan kamus dwibahasa Indonesia—bahasa daerah, penyusunan kamus bidang ilmu, penyusunan buku acuan, dan penerjemahan karangan bahasa asing dan bahasa daerah,
- b. peningkatan mutu keahlian dan profesi tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa beserta balai penelitian,

- c. pengembangan karya melalui penilaian buku kebahasaan dan kesusastraan dan penyelenggaraan sayembara karang-mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah,
- d. pendirian Balai Penelitian (dan Pembinaan) Bahasa yang baru di lima provinsi,
- e. peningkatan kerja sama kebahasaan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri.
- f. pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat yang luas.

2. Pelaksanaan Tugas

Pembinaan dan pengembangan bahasa dan susastra digiatkan melalui berbagai usaha yang berikut.

2.1 Penelitian

- 2.1.1 Penelitian bahasa dalam berbagai aspeknya
- 2.1.2 Evaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah
- 2.1.3 Penelitian susastra Indonesia lama dan modern
- 2.1.4 Penelitian susastra daerah lama dan modern
- 2.1.5 Kodifikasi khazanah kebahasaan dalam usaha penyusunan kamus ekabahasa, baik yang umum maupun yang khusus, kamus dwibahasa, ensiklopedi, dan tesaurus
- 2.1.6 Evaluasi pengembangan istilah bahasa Indonesia

2.2 Pengembangan

- 2.2.1 Penyusunan bahan pemasyarakatan bahasa Indonesia baku
- 2.2.2 Pembantapan sarana pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah
- 2.2.3 Penyusunan karya tulis susastra lama, susastra modern, dan penerjemahan karya susastra
- 2.2.4 Pelayanan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang leksikografi
- 2.2.5 Penilaian karya susastra
- 2.2.6 Penyediaan sarana pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa Indonesia dan daerah
- 2.2.7 Penyuluhan dan pelayanan informasi kebahasaan dan kesusastraan
- 2.2.8 Pengembangan bahan penyuluhan bahasa dan sastra serta bahan pustaka informasi kebahasaan dan kesusastraan
- 2.2.9 Kerja sama kebahasaan dan kesusastraan

2.3 Pembinaan Prasarana dan Sarana

- 2.3.1 Penyebaran hasil penelitian lewat penerbitan buku, majalah, dan brosur.
- 2.3.2 Penyimpanan bahan informasi kebahasaan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan dan pemanfaatan perpustakaan dan dokumentasi.
- 2.3.3 Peningkatan jumlah dan mutu tenaga profesional untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 2.3.4 Pengadaan dan pemanfaatan dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 2.3.5 Pengadaan dan pemanfaatan gedung, perlengkapan, dan alat-alat mobilitas; dan
- 2.3.6 Penyempurnaan organisasi dan pengelolaan.

3. Beberapa Hasil yang Dicapai Berdasarkan Program yang Diprioritaskan

3.1 Organisasi

Berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Oktober 1984 no. 14/U/1984, yang menyatakan bahwa Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat mengusulkan penyempurnaan struktur organisasi yang lebih memadai, langkah awal dalam hubungan itu adalah pembentukan sejumlah satuan kerja yang disesuaikan dengan ruang lingkup kerja serta tenaga yang ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada saat ini jumlah satuan kerja yang ada itu adalah sebagai berikut.

- 1. Satuan Kerja Bahasa Indonesia
- 2. Satuan Kerja Bahasa Daerah
- 3. Satuan Kerja Bina Sastra
- 4. Satuan Kerja Sastra Lama
- 5. Satuan Kerja Sastra Modern
- 6. Satuan Kerja Perkamusan
- 7. Satuan Kerja Peristilahan
- 8. Satuan Kerja Penyuluhan
- 9. Satuan Kerja Pembimbingan
- 10. Satuan Kerja Perpustakaan dan Dokumentasi
- 11. Satuan Kerja Perencanaan
- 12. Satuan Kerja Perlengkapan.

Setiap satuan kerja itu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala bidangnya masing-masing.

Nama *Balai Penelitian Bahasa* diusulkan agar diubah menjadi *Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* sehingga kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa di daerah berada pada koordinasi Balai Bahasa. Mulai tahun 1989/1990, ditetapkan wilayah kerja balai bahasa agar seluruh kegiatan penelitian kebahasaan dan kesusastraan dapat terkoordinasi dengan lebih baik dan berencana. Wilayah kerja itu adalah sebagai berikut.

No.	Balai Bahasa	Wilayah Kerja
1.	Yogyakarta	1. D.I. Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur
2.	Denpasar	1. Bali 2. Nusa Tenggara Barat
3.	Ujungpandang	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Utara 5. Sulawesi Tenggara.
4.	Padang (dalam proses pendirian)	1. D.I. Aceh 2. Sumatra Utara 3. Sumatra Selatan 4. Sumatra Barat 5. Bengkulu 6. Riau 7. Lampung
5.	Bandung (dalam proses pendirian)	Jawa Barat
6.	Banjarmasin (dalam proses pendirian)	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Barat 4. Kalimantan Timur

No.	Balai Bahasa	Wilayah Kerja
7.	Kupang (dalam proses pendirian)	1. Nusa Tenggara Timur 2. Timor Timur
8.	Jayapura (dalam proses pendirian)	1. Irian Jaya 2. Maluku

3.2 Ketenagaan

Salah satu faktor penting penunjang kelancaran dan keberhasilan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah adalah tersedianya tenaga ahli yang profesional. Dalam kaitan itu, beberapa kebijakan yang dilaksanakan dalam bidang ketenagaan selama ini adalah sebagai berikut.

- a. Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusastraan diarahkan kepada tenaga peneliti yang profesional dan usaha pembinaannya dilakukan atas kerja sama dengan Universitas Leiden lewat Indonesia Linguistics Development Project II (ILDEP II) yang memiliki program beasiswa pascasarjana untuk tingkat magister dan doktor. Dalam kaitan itu, 9 orang karyawan (7 orang di Jakarta, 2 orang di Yogya), mengikuti program S3 dan 6 orang (2 orang di Jakarta, 3 orang di Yogya, 1 orang di Ujungpandang) program S2.
- b. Semua tenaga teknis Pusat Bahasa, direncanakan ditingkatkan status kepegawaiannya menjadi tenaga peneliti. Untuk itu perlu diberikan dukungan dan motivasi kepada tenaga teknis agar dapat melakukan penelitian mandiri yang hasilnya diterbitkan. Dalam kaitan itu, secara bertahap telah terbit keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang jabatan fungsional tenaga peneliti untuk 7 orang karyawan, sedangkan penetapan untuk 45 orang sedang diproses.
- c. Jumlah tenaga teknis diusahakan lebih banyak daripada tenaga administrasi karena Pusat Bahasa adalah lembaga ilmiah. Untuk itu, secara bertahap telah diangkat pegawai baru yang bergelar sarjana sebanyak 72 orang.

- d. Untuk meningkatkan kemampuan pengusaha bahasa asing karyawan Pusat Bahasa dilaksanakan kursus bahasa Inggris intensif yang terdiri atas tiga kelompok.
- e. Dalam upaya peningkatan disiplin pegawai, khususnya yang berkenaan dengan jam kerja, dilaksanakan pengaturan absensi yang berkenaan dengan jam kerja, dilaksanakan pengaturan absensi yang berikut.
 - 1) Pagi hari karyawan menandatangani daftar hadir pada tempat yang disediakan dan paling lambat pukul 08.30 daftar hadir itu telah dikumpulkan oleh Subbagian Kepegawaian.
 - 2) Siang hari karyawan menandatangani daftar hadir di setiap unit kerjanya masing-masing pukul 15.00 (Senin—Kamis); 11.30 (Jumat) dan 14.00 (Sabtu).
 - 3) Keikutsertaan pada upacara bendera setiap bulan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan. Ketertiban masuk kantor dan kehadiran pada upacara bendera diperhitungkan dalam pengisian DP3 karyawan setiap tahun.
 - 4) Karyawan yang memperoleh izin mengajar pada waktu jam kerja, yang sebanyak-banyaknya dua jam setiap minggu, diharuskan mengganti jam kerja yang dipakainya pada sore hari setelah jam kerja.

3.3 Kerja Sama Kebahasaan

a. *Indonesian Linguistics Development Project II (ILDEP II)*

Sebagai lanjutan dari ILDEP I (1977—1985), pada tanggal 28 Januari 1988, di Jakarta, ditandatangani piagam kerja sama untuk tahap ILDEP II (1988—1994) yang bernilai NF 7.589.600 (NF 6.506.000 tanggungan Belanda dan NF 1.083.600 tanggungan Indonesia). Program yang telah dan sedang dikembangkan ialah :

- (1) pendidikan pasca sarjana : 21 orang telah menjadi doktor ilmu sastra; 30 orang sedang mengikuti program S3; dan 6 orang sedang mengikuti program S2;
- (2) automasi bank data perpustakaan dan perkamusan;
- (3) penataran tenaga profesional dalam rangka pendirian Balai Bahasa;
- (4) pengembangan kepustakaan lewat penerjemahan dan penerbitan.

b. *Majelis Bahasa*

Majelis Bahasa yang dibentuk pada tahun 1972 semakin semarak dengan keikutsertaan Brunei Darussalam menjadi anggota pada tahun 1985 sehingga yang semula bernama Majelis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM) berubah menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia (MABBIM) dan sampai saat ini telah melaksanakan persidangan sebanyak 28 kali. Jumlah istilah yang telah diolah kira-kira 100.000 dalam 50 cabang ilmu. Empat seri kamus ilmu dasar: matematika, fisika, kimia, dan biologi yang akan terdiri atas 43 jilid sedang diterbitkan.

c. *Kerja Sama dengan Pemerintah DKI Jakarta*

Dalam upaya meningkatkan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan wilayah DKI Jakarta, pada tanggal 18 Februari 1989, ditandatangani piagam kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kerjasama itu bertujuan meningkatkan citra dan wajah keindonesiaan di ibukota Jakarta, terutama dalam bahasa papan nama, papan reklame, badan usaha, dan rambu lalu lintas.

d. *Kerja Sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional*

Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan piagam kerja sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) di Jakarta.

Kerja sama itu bertujuan meningkatkan pemasyarakatan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintahan secara umum.

3.4 Prasarana dan Sarana

a. *Penerbitan*

Dalam rangka Kongres Bahasa Indonesia V, pada bulan Oktober 1988 telah disebarluaskan terbitan perdana *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* serta seperangkat kamus ilmu dasar.

Sejak tahun 1985 telah diterbitkan secara berkala *Lembar Komunikasi*, yaitu lembar lipatan yang memuat informasi kebahasaan dan kesusastraan dan *Informasi Pustaka Kebahasaan*, yang berisikan tentang informasi pustaka bahasa dan sastra mutakhir yang tersedia pada Perpustakaan Pusat Bahasa.

b. *Gedung dan Perlengkapan Kantor*

Pada tahun 1986 secara bertahap dilaksanakan pengadaan seperangkat komputer pengolahan teks untuk menunjang kegiatan kebahasaan dan kesusastraan.

Pada bulan April 1988, pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menyerahkan gedung Kantor seluas 4.400 meter persegi yang berada dalam satu pekarangan dengan Pusat Bahasa.

Dalam rangka pemeliharaan kebersihan, ketenteraman, dan kenyamanan tempat kerja, sejak tahun 1985 secara bertahap dilaksanakan penataan kembali ruang kerja karyawan, ruang sidang/seminar, kafetaria, serta taman dan tempat parkir.

c. *Kongres Bahasa Indonesia V*

Dalam rangka memperingati 60 tahun Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober – 3 November 1988, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta.

Kongres Bahasa Indonesia V bertema "Menjunjung Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Konteks Pembangunan Nasional", dengan subtema (a) Peningkatan Mutu dan Peran Bahasa Indonesia Memperlancar Usaha Pencerdasan Bangsa; (b) Bahasa Indonesia Merupakan Sarana Pemantapan Pembangunan Ketahanan Nasional; (c) Kemampuan Berbahasa Indonesia Merupakan Jembatan Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata.

Kongres itu bertujuan memantapkan bahasa Indonesia sehubungan dengan perannya untuk memperlancar usaha pencerdasan bangsa, sebagai jembatan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

Kongres diikuti oleh 819 orang peserta yang terdiri atas pakar bahasa dan peminat dari berbagai departemen, lembaga, instansi, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan perseorangan dari dalam dan luar negeri.

Kongres itu membahas 73 buah makalah dan 7 makalah di antaranya disajikan oleh Menteri Kabinet Pembangunan V.

Upacara pembukaan Kongres Bahasa V diresmikan oleh Presiden Soeharto, pada tanggal 25 Oktober 1989, pukul 16.30, di Istana Negara, Jakarta.

Selama kongres berlangsung diselenggarakan Pameran Buku atas kerja sama dengan berbagai penerbit dan perseorangan bertempat di Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba 28A, Jakarta.

BAB IV

RENCANA DAN PROGRAM KERJA TAHUN 1989/1990

Rencana dan program kerja tahun 1989/1990 adalah sebagai berikut.

A. Program Rutin

1. Penyusunan

- (1) Sketsa Tata Bahasa Daerah: Sumatra (Tahap I)
- (2) Inventarisasi Bahasa Daerah yang berpenutur satu juta orang keatas
- (3) Sociolinguistik (Tahap I)
- (4) Panduan Penulisan Kalimat
- (5) Antologi Susastra Lama Pengaruh Hindu (Cerita Wayang)
- (6) Informasi Novel Indonesia Tahun 1930 — 1940
- (7) Informasi Puisi Indonesia Tahun 1941 — 1950
- (8) Biografi Pengarang Indonesia Tahap IV
- (9) Almanak Susastra
- (10) Inventarisasi Kosakata
- (11) Penyelarasan Istilah
- (12) Bahan Penyuluhan Melalui Surat
- (13) Naskah Bunga Rampai Kebahasaan
- (14) Ringkasan Karangan : Kalimat Aktif dan Pasif
- (15) Pedoman Penyuntingan

2. Penelitian

- (1) Laras Bahasa: Bahasa Administrasi Perkantoran (tahap I)
- (2) Penelaahan Karya M. Balfas, Idrus, dan Muhammad Diponegoro
- (3) Penelaahan Karya Sapardi Djoko Damono dan Abdul Hadi W.M.
- (4) Penelaahan Hikayat Susastra Indonesia Zaman Peralihan (Hikayat Bikrama Cindra)
- (6) Penelaahan Kepahlawanan dalam Susastra Indonesia Lama: Kepahlawanan Hikayat Hang Tuah

3. Penerbitan

- (1) Informasi Pustaka Kebahasaan
- (2) Lembar Komunikasi
- (3) Naskah Bibliografi dan Buku Petunjuk
- (4) Seri Bunga Rampai Bahasa
- (5) Seri Pustaka Bahasa dan Susastra

4. Pembinaan Bahasa Indonesia di Timor Timur

5. Bulan Bahasa

B. Program Pembangunan

1. Penyusunan

- (1) Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi 2 (Tahap I)
- (2) Tata Bahasa Sekolah Menengah Tingkat Atas
- (3) Tata Bahasa Sekolah Dasar
- (4) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2 (II)
- (5) Kamus Fisika (Mekanika Kuantum)
- (6) Kamus Matematika (Analisis II)
- (7) Kamus Biologi (Ekologi dan Biogeografi)
- (8) Kamus Kimia (Farmasi dan Farmakologi)
- (9) Daftar Istilah Biologi₁₀ (Fitopatologi)
- (10) Daftar Istilah Fisika₉ (Teori Medan Kuantum)
- (11) Daftar Istilah Ilmu Bedah
- (12) Daftar Istilah Kimia₇ (Kimia Pertanian)
- (13) Daftar Istilah Matematika₁₁ (Komputasi II)
- (14) Daftar Istilah Fisika₁₀ (Mekanika Kuantum Kerelatifan)
- (15) Daftar Istilah Kimia₈ (Kimia Pangan)

- (16) Kamus Bahasa Indonesia—Jawa Kuno (I) (A—N)
- (17) Kamus Bahasa Indonesia—Sunda (I) (A—N)
- (18) Kamus Bahasa Indonesia—Bali (I) (A—N)
- (19) Kamus Bahasa Indonesia—Batak (I) (A—N)
- (20) Kamus Bahasa Indonesia—Tetun (I) (A—N)
- (21) Naskah Manfaat dan Nilai Susastra Nusantara
- (22) Pedoman Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Pengganti Pemakaian Bahasa Asing dalam Badan-badan Usaha

2. Pembinaan Bahasa Indonesia melalui TVRI dan RRI

3. Pemberian Penghargaan Penulisan *Susastra*

4. Pekan Apresiasi *Susastra*

5. Penerbitan buku

6. Pemberian Subsidi Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin

7. Penelitian Bahasa dan *Susastra* Indonesia dan Daerah :

- (1) Keterangan Pewatas dalam Bahasa Indonesia
- (2) Sistem Sapaan dalam Dialek Melayu Betawi
- (3) Kosakata Bahasa Sansekerta dalam Bahasa Indonesia II
- (4) Kosakata Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia I
- (5) Wajah Indonesia dalam *Susastra* Modern: Prosa 1920—1940
- (6) Wajah Indonesia dalam *Susastra* Modern: Puisi dan Drama 1920—1940
- (7) Keperluan Kebahasaan pada Kelompok Pemakai Bahasa di Jakarta
- (8) Bahan Tes Bahasa Indonesia 1983—1988
- (9) Fonologi Bahasa Sunda Baku
- (10) Cerita Misteri dalam *Susastra* Modern
- (11) *Susastra* Lisan Sambas: Teks, Struktur, dan Lingkungan Penceritaan
- (12) Fonologi dan Morfologi Bahasa Muko-Muko
- (13) Pengungkapan Nilai Budaya Lampung melalui *Susastra* Lampung
- (14) *Susastra* Lisan Melayu Deli
- (15) Morfologi Adjektiva Bahasa Aceh
- (16) Fonologi Bahasa Mentawai
- (17) *Susastra* Lisan Mantra Daerah Riau
- (18) Inventarisasi *Susastra* Jawa Pesisir Sebelum Abad XX
- (19) Nilai-nilai Budaya *Susastra* Jawa
- (20) Nilai-nilai Budaya *Susastra* Bali dan Nusa Tenggara Barat
- (21) *Susastra* Lisan Dawan
- (22) Fonologi Bahasa Bakumpai
- (23) Morfologi Bahasa Dusun

- (24) Nilai-nilai Budaya Susastra Daerah Sulawesi
 - (25) Struktur Susastra Lisan Mori
 - (26) Fonologi Bahasa Waropen
 - (27) Morfo-Sintaksis Verba Bahasa Alune
 - (28) Puisi Susastra Lisan Daerah Gorontalo
- 8. Penyuluhan Bahasa Indonesia di 20 propinsi seluruh Indonesia
 - 9. Penerbitan dan penyebarluasan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kurun waktu lima tahun (1984 — 1989), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berupaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan dalam pelaksanaannya itu dapat disimpulkan beberapa hal yang berikut.

1. Peningkatan mutu dan jumlah tenaga kebahasaan dan kesusastraan secara bertahap telah dilaksanakan.
2. Peningkatan mutu hasil penelitian mulai ditingkatkan dengan memberikan berbagai pelatihan kepada para peneliti yang digolongkan sebagai pemula.
3. Penerbitan *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, yang merupakan salah satu tugas penting dalam pembakuan kebahasaan telah dapat terlaksana pada tahun 1988.
4. Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia V dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Peningkatan kerja sama kebahasaan dengan berbagai pihak, dalam upaya memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat terlaksana.
6. Pembinaan sarana dan prasarana sebagai unsur pendukung berbagai kegiatan kebahasaan itu telah dilaksanakan dengan mengadakan berbagai perbaikan gedung kantor dan perlengkapannya.

B. Harapan

Selama kurun waktu empat setengah tahun saya, selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, telah mendorong usaha dengan hasil

yang tidak mengecewakan. Namun, masih ada pula beberapa pekerjaan yang telah direncanakan yang belum selesai karena berbagai kendala. Oleh karena itu, beberapa harapan yang dapat saya sampaikan dalam kaitan dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa adalah sebagai berikut.

1. Semangat kerja sama yang baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan, baik antarkaryawan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa maupun antarinstansi agar semua usaha dalam rangka pencapaian tujuan dapat memperoleh kemudahan.
2. Peningkatan mutu dan jumlah tenaga kebahasaan dan kesusastraan hendaknya tetap dipelihara.
3. Peningkatan mutu hasil penelitian berbagai aspek kebahasaan dan kesusastraan harus mendapat prioritas.
4. Kesempatan dan kemudahan bagi karyawan yang berprestasi dalam upaya pengembangan keprofesionalan bidang bahasa dan susastra hendaknya diupayakan.

Jakarta, 21 Maret 1989



Anton M. Moeliono

